

Judul : PDIP Tagih Janji Novanto
Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

PDIP Tagih Janji Novanto

Terkait Kursi Penambahan Pimpinan DPR RI

JAKARTA-PDIP menagih janji Ketua DPR RI Setya Novanto dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Terkait penambahan kursi pimpinan yang dituangkan dalam Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pasalnya, hingga saat ini perihal itu belum terealisasi lantaran mandeg.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan, baik Setya Novanto selaku Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI pernah berjanji kepada partai berlabang moncong putih dan dilayangkan langsung dihadapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Janji itu, sambung anggota Komisi XI DPR RI itu, soal memberikan jatah kursi pimpinan kedua lembaga di parlemen kepada PDIP sebagai partai politik pemenang pemilu 2014.

"Ketika ketemu sama Ibu Mega, Pak Setya Novanto sudah minta ampun. Saya minta maaf, karena Golkar kemudian PDIP tidak bisa jadi ketua. Dan sebagai kompensasi, maka Golkar akan mendukung revisi dan menyetujui penambahan kursi di DPR dan MPR," ungkapnya kepada wartawan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Nasib Penambahan Kursi Ketua DPR/MPR dalam Revisi UU MD3 di Media Center, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/10).

Demikian juga Zulkifli Hasan, sambung Eva, ketika ketemu Megawati meminta maaf dan komitmennya sama seperti Novanto, karena ulah Koalisi Merah Putih (KMP) sehingga ada anomali di dalam penyusunan kepemimpinan di UU MD3 kemarin. "Di pertemuan itu, baik Novanto yang juga Ketua Umum Golkar, dan Zulkifli yang Ketua Umum Partai Amanat Nasional, sama-sama mengakui bahwa kursi pimpinan DPR dan MPR adalah sebenarnya jatah PDIP sebagai pemenang pemilu," ujarnya. Oleh sebab itu, lanjutnya, PDIP men-

unggu realisasi janji pimpinan tertinggi di Golkar dan PAN itu untuk membuktikan. "Janjinya mana? Semua pimpinan fraksi juga mengakui bahwa (kursi pimpinan, Red) itu hak PDIP. Itu konsensus tak tertulis. Tapi kenyataan tak ada," terang Eva.

Bagi PDIP sendiri, masih menurut Eva, realisasi janji itu penting demi menghormati hak mayoritas rakyat yang ingin PDIP memimpin di parlemen. Keinginan itu terefleksikan dari kemenangan partai dalam pemilu legislatif (pileg) 2014. "Kita tak ingin hak rakyat yang memilih PDIP untuk menjadi speaker DPR dibajak. Dengan merevisi UU MD3, maka kita menganulir dan mengoreksi anomali yang ada," kata Eva.

Disinggung mandegnya pembahasan Revisi UU MD3 apakah terjadi deal-deal politik baru menjelang tahun politik? Eva mengaku hal tersebut tidak terjadi. PDIP saat ini justru 'wait and see' saja. Ditanya kembali mengapa PDIP tidak melakukan desakan? Eva mengatakan, pihaknya bisa saja mendorong hal ekstrim. Semisal, meminta Presiden Joko Widodo membekukan parlemen dan menyusun ulang. Namun, PDIP selalu memegang politik berkeadaban sehingga takkan menggunakan tangan besi kekuasaan demi kursi politik.

Sejatinya, tutur Eva, yang diharapkan adalah frak-fraksi yang ada di DPR bersedia mengoreksi anomali yang kini terjadi dipicu oleh permainan di UU MD3 hanya demi tak memberikan hak kursi pimpinan bagi partai politik pemenang pemilu. Diakui, PDIP sudah berusaha semaksimal mungkin mendorong agar revisi UU MD3 dilakukan. Bola kini berada di pihak fraksi lainnya di DPR. "Kalau mau koreksi anomali-anomali itu, ya sekarang. Mau meninggalkan 'legacy' baik apa tidak? Ini kesempatan terakhir mengoreksi agar segala sesuatunya menjadi baik," imbuhnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, dari gagasan



TAGIH KURSI: Anggota Fraksi PDIP di DPR Eva Kusuma Sundari bersama Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memaparkan pandangannya dalam diskusi dialektika demokrasi di Media Center, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10).

perubahan ini terlihat betul ada dua persoalan yang tidak memiliki basis konstitusional yang kuat. Sementara yang satu punya basis konstitusional yang kuat, basis konstitusional itu adalah menyertakan DPD dalam pembahasan UU yang di UU MD3 sekarang ini tidak cukup akomodatif kalau ditakar berdasarkan keputusan MK beberapa waktu lalu yang mengharuskan DPD itu diikuti sertakan dalam pembahasan UU yang tadi dan sekurang-kurangnya dalam pasal 22 dan saya kira itu serius karena itu memiliki basic konstitusional yang kuat dan merupakan perintah dari konstitusi.

"Tetapi di atas itu semua, saya ingin karena soal penambahan kursi dan jumlah kursi itu bukan isu konstitu-

sional yang mendasar sehingga mungkin ada baiknya dipikirkan untuk diuji saja semuanya. Kocok lagi pemenang Pemilu jadi ketua dan yang lainnya jadi anggota. Jadi pasal 84 itu, pimpinan MPR terdiri dari satu ketua dan misalnya ada 9 anggota dan itu tidak apa-apa karena itu tidak bertentangan dengan konstitusi," paparnya.

Dia menyebut, UUD 1945 memang tak mengatur soal berapa banyak pimpinan parlemen dan siapa saja yang boleh memimpinya. Maka itu, dasar untuk menunjuknya adalah kesepakatan pembuat hukum berdasarkan sebuah rasionalitas. Bicara soal rasionalitas, menurut Margarito, seharusnya yang mendapatkannya adalah yang memperoleh suara ter-

banyak saat pemilihan umum. "Rasionalitas itu mau tak mau menerima yang terbesar kursinya di DPR adalah yang jadi pimpinan. Itulah rasionalitas demokratisnya," ucapnya di lokasi yang sama.

Oleh sebab itu, lanjutnya, dirinyapun mendorong agar fraksi-fraksi di DPR mulai kokoh berdiri mengusung sebuah politik yang berkeadaban. Semaunya harus bersedia menunjukkan dirinya memiliki komitmen dengan politik yang beretika. "Kalau rasionalitas yang kursinya paling banyak menjadi pimpinan itu dipakai, kita sehat demokrasinya. Itu mesti dilembagakan di UU MD3 yang harus diubah. Itu harus benar-benar jadi prinsip untuk pemilu berikutnya," imbaunya. (aen)

Ketika ketemu sama Ibu Mega, Pak Setya Novanto sudah minta ampun. Saya minta maaf, karena Golkar kemudian PDIP tidak bisa jadi ketua.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI